

BAB IV

FAKTOR PENGHAMBAT MONUSCO (2010 – 2015)

Bab ini akan menjelaskan tentang upaya apa saja yang telah dilakukan PBB dalam konsolidasi serta stabilisasi keamanan di Republik Demokrasi Kongo. Lalu menganalisa faktor faktor penghambat upaya PBB. Data dan peristiwa yang ditulis merupakan peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu 2010 – 2015. PBB dalam konflik ini adalah sebagai pihak ketiga yang membantu pemerintah Republik Demokrasi Kongo untuk menciptakan kondisi masyarakat dan politik yang aman.

Konflik yang terjadi di Republik Demokrasi Kongo telah berjalan sangat lama dan menjadi sangat kompleks, melibatkan aktor negara dan bukan. Keterlibatan PBB dalam masalah ini sudah sangat lama sekali. Pengerahan pasukan perdamaian PBB yang bernama *Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO) pada tahun 2010 untuk memenuhi Mandat Dewan Keamanan PBB 1925. Namun mandat yang sudah disebutkan tadi secara bertahap meluas dan bertambah seiring dengan situasi yang ada. Ini dilakukan untuk mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata, perlindungan warga sipil, proses verifikasi untuk pengerahan pasukan yang ada, dan dukungan terhadap hak asasi manusia.¹

¹ Devon Whittle, PEACEKEEPING IN CONFLICT: THE INTERVENTION BRIGADE, MONUSCO, AND THE APPLICATION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW TO UNITED NATIONS FORCES, 2015. Hal 842

Galtung menjelaskan, dimana dalam sebuah konflik yang terjadi terdapat dua bentuk permasalahan. Permasalahan yang terlihat dan tidak terlihat. Proporsi dari permasalahan ini tidaklah berimbang. Permasalahan yang terlihat adalah berbentuk *direct violence* sementara permasalahan yang besar justru bukan sesuatu yang terlihat seperti politik, kepentingan, etnis, dan ekonomi.²

Dalam pedoman MONUSCO dalam *peacekeeping operation*, yaitu mandat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 1925 menyebutkan bahwa tugas dari MONUSCO menyangkut dua hal : *protection of civillian* dan *stabilization and peace consolidation*. Mengimplikasikan secara tidak langsung bahwa penerjungan MONUSCO menggantikan MONUC adalah sebuah tahapan menuju *peacemaking*.

Galtung menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah sesuatu yang dilakukan secara bertahap. *Peacemaking* tidak dapat tercapai apabila kondisi damai dimana kekerasan atau *direct violence* tidak dapat ditekan.³ Negosiasi damai tidak dapat dilakukan apabila semua pihak yang bertikai tidak ada yang mau mengalah atau berkompromi terhadap kepentingannya.

Faktor-faktor yang membuat PBB lewat MONUSCO belum berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi di Kongo adalah:

² Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver, dan Woodhouse Tom. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontempore r, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras.* (terj.) Jakarta: Grafindo Persada. Hal.20-21

³ *Ibid*

1. PBB Tidak Dapat Melakukan Perannya sebagai Mediator.

a. PBB Gagal Mengajak Kelompok Bersenjata untuk Negosiasi

Berkebalikan dengan *direct violence* yang dikemukakan Galtung, konflik non-visible biasanya bersifat lebih dasar dan tidak nampak di permukaan, *non visible*.⁴

Permasalahan di Republik Demokrasi Kongo tidak hanya berupa konflik kekerasan, namun adanya perbedaan kepentingan dari pihak – pihak berkonflik. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan aktor – aktor yang terlibat dalam konflik ini. Setelah periode pasca perang Kongo yang kedua CNDP dan M23 adalah gerakan yang muncul karena adanya konflik yang disebabkan perebutan kekuasaan. PBB tidak hanya melakukan aksi dan operasi militer dalam upayanya menstabilkan keamanan di Republik Demokrasi Kongo, PBB juga melakukan aksi yang bersifat non militer.

Sejak ditariknya MONUC dan digantikan dengan MONUSCO, terdapat beberapa upaya dari PBB untuk mendukung aksi konsolidasi pemerintahan lewat negosiasi damai Republik Demokrasi Kongo. Salah satunya adalah dengan penjatuhan sanksi embargo senjata pada Oktober 2012 yang ditujukan kepada pemberontakan bersenjata M23 yang ada di Republik Demokrasi Kongo.

Pada Desember 2012, PBB mengupayakan terjadinya pembicaraan damai antara M23 dengan Pemerintah Republik Demokrasi Kongo di Kampala, Uganda. Namun hal ini gagal karena pihak M23 menolak hadir dalam pertemuan tersebut.⁵

⁴ Mohtar Mas'ood, *loc. cit.*

Pada Februari 2013, PBB memprakarsai pertemuan antara 11 negara Afrika di Ethiopia. Menandatangani kesepakatan untuk membantu upaya damai di Republik Demokrasi Kongo. Pada saat terjadinya pembicaraan ini, M23 mengusulkan gencatan senjata di waktu sebelumnya.⁶

Kemudian negosiasi antara pihak pemerintah dengan pemberontak M23 pada november 2013. Saat M23 memberikan syarat untuk membebaskan anggota dan pendukungnya sebagai ganti untuk mereka mundur dari timur kota Goma. Negosiasi ini gagal.⁷ Pemerintah Republik Demokrasi Kongo justru malah menolak pembicaraan damai dan melakukan operasi militer ke markas – markas M23.

Pembicaraan damai akhirnya dilakukan setelah FARDC bersama dengan MONUSCO menghancurkan markas terakhir dari M23 di Goma. Operasi ini berlangsung pada Juli 2013 dan berakhir setelah menyerahnya pemimpin M23 Bosco Ntaganda kepada kedutaan Amerika Serikat di Rwanda. Ntaganda menghadapi pengadilan oleh ICC (*International Criminal Court*).⁸ Negosiasi damai dan pernyataan menyerah M23 berlangsung pada Desember 2013.

Sementara pada Oktober 2014, MONUSCO mencoba melakukan pertemuan dengan pemimpin kelompok FDLR. Pertemuan ini ditujukan agar kelompok tersebut berhenti melakukan kejahatan dan pelanggaran hak asasi

⁵ Voa Indonesia, *Negosiasi Damai di Kongo Gagal*, diakses pada <http://www.voaindonesia.com/a/negosiasi-damai-di-kongo-gagal/1562385.html> 12 juli 2016

⁶ BBC News, *DR Congo: Timeline*, diakses pada <http://www.bbc.com/news/world-africa-13286306> 12 Juli 2016

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

manusia di daerah Kivu Utara. FDLR, dituding melakukan kejahatan karena dengan sengaja melakukan penculikan dan merekrut tentara dibawah umur. Namun sayangnya negosiasi ditolak oleh pihak FDLR.⁹

Setelah itu, belum ada lagi upaya untuk melakukan negosiasi damai dengan gerakan bersenjata lainnya. Terdapat lebih dari 30 gerakan bersenjata yang ada di Republik Demokrasi Kongo, mayoritas dari gerakan bersenjata tersebut adalah gerakan Mayi-Mayi yang biasanya berjumlah kecil dan tersebar di banyak daerah dengan penduduk. Bahkan hingga saat ini belum ada jalan negosiasi dengan kelompok bersenjata seperti FDLR yang merupakan kelompok bersenjata yang paling besar di Republik Demokrasi Kongo.

2. PBB memiliki Keterbatasan Wewenang di Republik Demokrasi Kongo.

a. Panduan *Peacekeeping Operation* yang membatasi MONUSCO

MONUSCO terlalu terikat dengan Dewan Keamanan PBB, sehingga tidak dapat beroperasi diluar dari mandat yang diberikan. Sementara keadaan di lapangan tidak selalu memungkinkan hal tersebut untuk diterapkan. Mandat selalu mengalami perubahan dan penambahan seiring dengan situasi, namun proses yang dibutuhkan cukup lama.

Untuk mengatasi perubahan dan beradaptasi dengan situasi di Republik Demokrasi Kongo, PBB melalui Dewan Keamanan melakukan perubahan

⁹ *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, hal 6

ataupun penambahan mandat lewat resolusi dewan keamanan PBB. Namun dalam tetap berpedoman dari mandat yang sebelumnya.

Dalam panduan pelaksanaan PBB berpedoman pada tiga hal, persetujuan pihak yang berkonflik, tidak memihak, dan damai.¹⁰

Hingga akhir tahun 2015 MONUSCO telah melakukan 4 kali perubahan atau penambahan mandat, sebagai berikut:

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1925

Dikeluarkan pada 28 Mei 2010, merupakan pedoman utama dan misi dari MONUSCO yang diterjunkan pada 1 Juli 2010 menggantikan MONUC.

Mengatur tugas, misi, jumlah pasukan, dan batasan dari operasi MONUSCO.

Masuknya pasukan perdamaian MONUSCO merupakan kepanjangan tugas dari misi sebelumnya, MONUC. Sehingga dalam hal ini, izin untuk beroperasi dan sebagainya telah diurus pada masa sebelumnya. Pembicaraan tentang penambahan masa tugas pasukan perdamaian juga telah dilakukan MONUC sebelum meninggalkan Republik Demokrasi Kongo.

Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1925 pasal 12 menyatakan bahwa
“(1) Taking fully into account the leading role of the Government of the Democratic Republic of the Congo, support, in close cooperation with other international partners, the efforts of the Congolese authorities to strengthen and

¹⁰ Clive Archer, *op. cit*, hal 131

reform security and judicial institutions”¹¹

Serta mengingat juga,

“Reaffirming its commitment to the sovereignty, territorial integrity and political independence of the Democratic Republic of the Congo,”¹²

MONUSCO tidak dapat melakukan operasi militer yang bersifat menyerang (*raid operation*) tanpa adanya persetujuan Pemerintah Republik Demokrasi Kongo atau permintaan bantuan oleh FARDC. Hal ini berkaitan juga dengan pedoman PBB masalah kedaulatan sebuah negara.

Sebagai gantinya MONUSCO hanya dapat melakukan pelatihan bersama FARDC dan membantu dalam pembentukan Pengadilan Militer. Tidak hanya itu MONUSCO juga membentuk satuan polisi Republik Demokrasi Kongo lewat *JSS (Justice Support System)*. Dalam upayanya untuk memperbaiki tingkat keamanan di Republik Demokrasi Kongo.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2053

Resolusi ini dikeluarkan pada 27 Juni 2012, demi memastikan tercapainya tujuan dari misi perdamaian MONUSCO terutama dalam hal pembangunan satuan militer yang dapat melakukan perlindungan terhadap warga. Resolusi ini juga menambah jumlah maksimal personel MONUSCO yang diperbolehkan oleh PBB dan disepakati oleh Republik Demokrasi Kongo.

¹¹ UN Security Council Resolution 1925, hal 6

¹² *Ibid*, hal 1

Perubahan mandat terjadi setelah melihat adanya perubahan dan situasi yang berlangsung, seperti:

“Stressing the need for the Congolese authorities to address the irregularities and challenges identified by national and international observers during the presidential and general elections on 28 November 2011 as well as the need to hold provincial and local elections in a timely, inclusive, peaceful, credible and transparent manner”¹³

“Expressing deep concern at the deteriorating security situation in the eastern provinces of the Democratic Republic of the Congo, including attacks by armed groups, attacks on peacekeepers and humanitarian personnel, which have restricted humanitarian access to conflict areas where vulnerable civilian populations reside, and the displacement of tens of thousands of civilians, and calling on all armed groups to cease hostilities, including all acts of violence committed against civilians, and urgently facilitate unhindered humanitarian access,”¹⁴

Resolusi ini juga menambah masa tinggal pasukan MONUSCO di Republik Demokrasi Kongo hingga 30 Juni 2013.

Resolusi Dewan Keamanan 2098

Resolusi ini dikeluarkan melihat situasi dan aksi kekerasan di Republik demokrasi Kongo yang tidak kunjung membaik. Resolusi ini menambah masa

¹³ UN Security Council Resolution, hal 1

¹⁴ UN Security Council Resolution 2053, hal 4

tinggal pasukan Monusco hingga 23 Mei 2014. Kemudian terkait dengan situasi yang ada PBB membentuk pasukan Brigade Intervensi yang akan bekerja dibawah MONUSCO.¹⁵

Pada saat itu Republik Demokrasi Kongo sedang sangat kesulitan akibat munculnya gerakan M23 yang sempat berhasil menduduki kota Goma. MONUSCO yang hanya memiliki peran sebagai *support*, tidak dapat berfungsi secara optimal karena FARDC kewalahan menghadapi gerakan M23. Sementara di timur Kongo, gerakan seperti ADF dan FDLR dapat memperburuk situasi di Timur Kongo apabila tidak terkontrol.¹⁶

Resolusi Dewan Keamanan 2147

Pada 28 Maret 2014 PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan 2147 yang memperpanjang masa tinggal MONUSCO hingga 31 Maret 2015. Resolusi ini juga mengatur dan memberi mandat untuk Brigade Intervensi. Memberikan area operasi dan jumlah tentara yang dikerahkan. Dengan tujuan yang masih sama yaitu melindungi warga sipil, membantu kestabilan negara, dan mendukung implementasi damai.¹⁷

Perubahan mandat memang ditujukan untuk beradaptasi dengan situasi dari konflik yang terjadi di Republik Demokrasi Kongo. Dengan misi dan tujuan yang tetap sama sejak awal. Namun tidak cukup fleksibel dan cenderung lambat

¹⁵ <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/mandate.shtml> diakses pada 3 Desember 2016

¹⁶ Julie Reynaerts, *op. cit.* hal 25

¹⁷ <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/mandate.shtml> diakses pada 3 Desember 2016

karena Resolusi Dewan Keamanan harus mempertimbangkan data yang diambil oleh *observator* milik MONUSCO. Padahal MONUSCO hanya dapat beroperasi sesuai yang dimandatkan oleh Dewan Keamanan PBB.¹⁸

b. PBB Tidak Dapat Menghentikan Bantuan Negara Lain.

Uganda dan Rwanda terbukti memberi dukungan kepada gerakan M23 dalam bentuk senjata. Komandan UPDF (Tentara Uganda) memberikan bantuan tentara dalam hal pelatihan rekrutmen tentara baru dan telah terlibat dalam beberapa operasi M23.¹⁹

Andre Mwamba Kapanga, Perwakilan Republik Demokrasi Kongo di PBB mengatakan, “Perang dengan gerakan pemberontak merupakan pertempuran 3 arah, tentara pemberontak dilatih dan berkoordinasi dengan Pasukan dari Pemerintah Uganda dan Rwanda yang melindungi mereka.”²⁰

Para pemberontak juga didukung secara finansial oleh pedagang Rwanda yang mendapatkan keuntungan dari berdagang timah, tungsten, dan talum. Barang-barang yang diselundupkan lewat jalur tambang di dekat perbatasan Republik Demokrasi Kongo dengan Rwanda.²¹

PBB tidak memiliki pengaruh untuk menekan negara-negara seperti Rwanda dan Uganda yang memberi bantuan terhadap kelompok bersenjata yang

¹⁸ Touko Piiparinen, *UN Statebuilding at a Turning Point (What's New About Intervention Brigade and Drones?)*, The Finnish Institute of International Affairs, 2013. hal 6-7

¹⁹ *Ibid*, hal 5

²⁰ Wawancara Andre Mwamba Kapanga, 21 Juli 2015, diakses pada <https://www.youtube.com/watch?v=bVjxfZcXI5A> 3 Desember 2016

²¹ *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, 2015 hal 6

ada di Republik Demokrasi Kongo. Meskipun sudah sering PBB melakukan kesepakatan dan pembentukan kebijakan untuk menanggulangi kekerasan di wilayah Danau Besar Afrika dengan *Council of Great Lakes Region*.

Sejauh ini PBB hanya dapat memberikan sanksi embargo dan kecaman yang diberikan oleh PBB untuk pihak pihak kelompok bersenjata dan negara yang mendukung mereka.

3. PBB Kekurangan Sumber Daya untuk Menekan Pemberontak.

- a. Kurangnya jumlah Pasukan Brigade Intervensi (*Forces of Intervention Brigade*)

Galtung, menjelaskan bahwa konflik dapat dilihat menjadi dua bentuk *visible* dan *non visible*. *Visible*, sebagaimana artinya adalah konflik yang tampak di permukaan adalah *direct violence* seperti kekerasan,kerusuhan, pemerkosaan, penculikan, dan pembunuhan.²²

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, korban jiwa yang jatuh akibat kekerasan dan kerusuhan yang terjadi di Republik Demokrasi Kongo telah mencapai angka lebih dari 860.000 jiwa.²³ Ditambah dengan korban jiwa yang meninggal akibat malnutrisi, penyakit, dan lainnya jumlahnya mencapai lebih dari 2,83 juta jiwa. Dengan total lebih dari 5,4 juta jiwa sejak pecahnya perang

²² Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisi dan Teorisi*, Universitas Gadjah Mada, 1989 hal 43

²³ Human Right Watch, *Casualties Report 2015*, 2015 diakses pada <https://www.hrw.org/reports/2015/congo/Congoweb-02.htm> 1 Desember 2016

Kongo pertama.²⁴ Republik Demokrasi Kongo merupakan salah satu dari sebelas wilayah dimana 20% dari anak-anak yang lahir akan mati sebelum mencapai umur lima tahun.²⁵

MONUSCO, sesuai dengan mandat yang telah diberikan pada bagian *protection of civilian*, “*to use all necessary means to carry out its mandate relating, among other things, to the protection of civilians, humanitarian personnel and human rights defenders under imminent threat of physical violence and to support the Government of the DRC in its stabilization and peace consolidation efforts.*”

Untuk mengatasi hal ini, MONUSCO telah melakukan upaya dengan mengadakan pelatihan tentara untuk FARDC dan operasi gabungan dengan FARDC. Dewan Keamanan membentuk Brigade Intervensi pada 2013 yang memiliki kewenangan lebih aktif untuk melakukan operasi militer di daerah yang telah disepakati dengan pemerintah Republik Demokrasi Kongo.

Force Intervention Brigade, atau Brigade Intervensi merupakan pasukan militer yang bekerja dibawah MONUSCO namun memiliki peran yang lebih aktif dalam perlindungan terhadap warga sipil yang ada di Republik Demokrasi Kongo. Pasukan ini disahkan oleh Dewan Keamanan PBB pada 28 Maret 2013 melalui Resolusi Dewan Keamanan 2098. Brigade Intervensi merupakan pasukan pertama

²⁴ David mayeda, *DRC Death Toll Exceeds 5 Millions & Almost no News Coverage*, 2012 diakses pada <http://sociologyinfocus.com/2012/11/aware-of-ongoing-violence-democratic-republic-of-the-congo/> 1 Desember 2016

²⁵ <https://www.theguardian.com/world/2008/jan/23/congo.international> diakses pada 1 Desember 2016

dari PBB yang dikhususkan untuk operasi yang bersifat menyerang untuk menetralsir ancaman dari gerakan bersenjata yang mengancam keselamatan nyawa penduduk yang ada di Republik Demokrasi Kongo. Brigade Intervensi dapat melakukan operasi militer baik bersama FARDC ataupun tidak. Pasukan ini berbasis di Kivu Utara dan terdiri dari 3069 orang tentara perdamaian.²⁶ Brigade Intervensi terdiri dari pasukan perdamaian dari Afrika Selatan, Tanzania, dan Malawi.²⁷

Brigade Intervensi telah terlibat dalam operasi gabungan dengan FARDC dalam pengambil alihan Goma dari M23 pada Juli-Agustus 2013. Operasi yang dilakukan bertujuan untuk melindungi warga sipil. Helikopter tempur, kendaraan lapis baja, dan pasukan angkatan darat dikerahkan dalam operasi tersebut. 14 orang tentara PBB tewas dan puluhan ribu orang mengungsi akibat pertempuran tersebut.²⁸

Brigade Intervensi juga melakukan operasi militer pada 22 Oktober 2013 di Kiwanja, bagian timur Kongo. Demi peningkatan keamanan dengan melakukan penyergapan di markas markas gerakan pemberontak CNDP.²⁹

Brigade Intervensi telah terlibat pada beberapa operasi militer di daerah lainnya yaitu :³⁰

²⁶ <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44876#.WEAmidV97IV> diakses pada 1 Desember 2016

²⁷ <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44876#.WEAmidV97IV> diakses pada 1 Desember 2016

²⁸ Izmi Ruzzan Azzahra, *op. cit*, hal 58

²⁹ *Ibid*

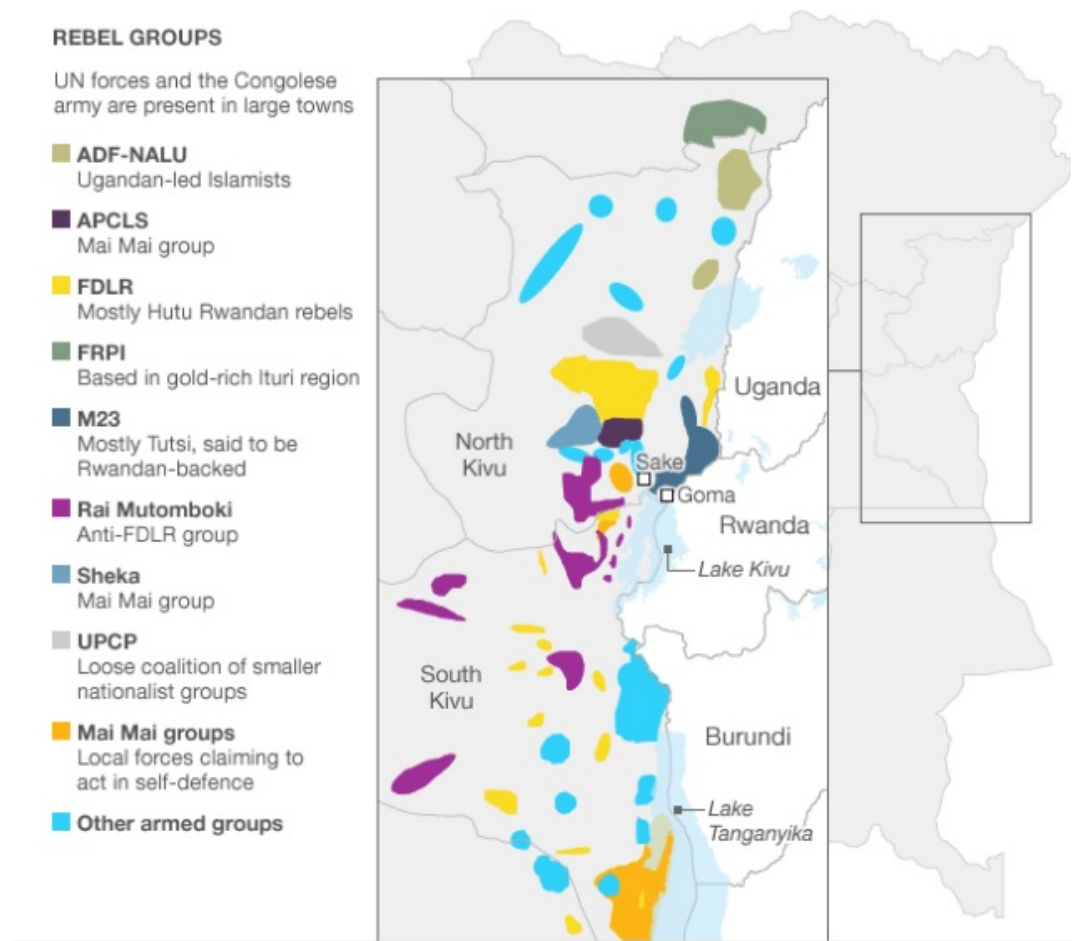
- Operasi militer di Kibati (Triple Tower)
- Operasi militer di Beni
- Operasi militer di Nyiabiondo
- Operasi Militer di Kitchanga

Brigade Intervensi dibentuk dengan tujuan menjadi pasukan yang lebih fleksibel dengan respon cepat. Sejak aktifnya Brigade Intervensi, telah melemahkan kelompok bersenjata seperti ADF, CNDP, dan FDLR dengan operasi penyergapan ke markas-markas mereka.

(Gambar 4.1 : Persebaran tentara dan basis kelompok bersenjata di Timur Kongo)³¹

³⁰ *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, hal 5-6

³¹ Data Oxfam dalam <http://www.bbc.com/news/world-africa-20586792> Diakses 11 Juni 2016



Namun beberapa halangnya adalah jumlah pasukan Brigade Intervensi terlalu sedikit dan area operasi mereka hanya di daerah timur dari Republik Demokrasi Kongo. Hal tersebutpun belum dapat mengatasi aksi kekerasan yang ada di daerah tersebut.

Di daerah Beni saja masih terjadi 350 hingga 450 aksi kekerasan yang tercatat dari Oktober 2014 sampai Juni 2015.³² Belum lagi daerah dengan akses yang sulit dicapai MONUSCO seperti Mbau, yang masih berada di area Timur

³² Al-Jazeera English, *DR Congo Population no Longer Trust Peacekeepers*, 2015, Diakses pada <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/01/peacekeepers-drc-longer-trusted-protect-160112081436110.html> 2 Desember 2016

Kongo. Ketika pada Desember 2014 terjadi pembunuhan yang menghabiskan 100 lebih korban jiwa.³³

Pembentukan dari Brigade ini juga dirasa terlalu lama sehingga gerakan-gerakan seperti ADF dan CNDP sudah semakin meluas. Korban jiwa yang telah jatuh terlalu banyak hingga menimbulkan rasa tidak percaya dari masyarakat.

Teddy Muhindo Kataliko, Kepala kelompok sipil di Beni mengatakan “Warga sudah tidak lagi percaya kepada MONUSCO, penyebab pertama adalah setelah melihat banyak sekali korban yang jatuh, apalagi setelah melihat perlengkapan dan senjata yang ada di gudang mereka. Warga merasa bahwa MONUSCO tidak lagi memiliki niat untuk melindungi mereka.”³⁴

b. Permasalahan Komunikasi

Komunikasi yang efektif antara warga sipil dan pasukan perdamaian akan mempermudah perolehan informasi yang akurat. Hal ini merupakan jalan terbaik untuk mencegah ancaman dan melindungi warga. Terutama karena MONUSCO beroperasi di daerah dengan situasi yang kompleks, komunikasi dengan warga merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap situasi.³⁵

Komunikasi menjadi masalah yang sangat pelik bagi MONUSCO dalam misinya mengupayakan perlindungan dan pemulihan keamanan di Republik

³³ Kompas, *Pembantaian di Republik Demokratik Kongo, 100 Tewas*, 2014, diakses pada <http://internasional.kompas.com/read/2014/11/24/21011481/Pembantaian.di.Republik.Demokratik.Kongo.100.Tewas> 11 Juli 2016

³⁴ Al-Jazeera English, *loc. cit.*

³⁵ Julie Reynaerts, *op. cit.*, hal 28

Demokrasi Kongo. Dalam misinya untuk melindungi warga sipil (*protection of civilian*) serta mendukung langkah stabilisasi keamanan salah satu upaya dari MONUSCO adalah dengan pembentukan JPT (*Joint Protection Team*) yang terdiri dari MONUSCO, FARDC, dan warga sipil. Dengan sistem ini diharapkan nantinya keamanan warga sipil akan lebih terjaga karena keamanan baik polisi maupun tentara dapat lebih cepat merespon ancaman. Sehingga menekan angka kejahatan dan korban sampai berangsur angsur habis.

Komunikasi sangat lemah ditambah lagi dengan ketidakpercayaan warga terhadap MONUSCO. Ditambah lagi ada masalah perbedaan bahasa yang digunakan.³⁶

Memang pada kenyataannya tentara perdamaian MONUSCO tidak dapat berkomunikasi baik dengan warga karena sedikit sekali yang berbicara dengan bahasa Perancis atau Swahili. Karena tentara yang ditempatkan di daerah yang sering terjadi kasus kejahatan seperti Kivu Utara dan Selatan mayoritas adalah tentara dari India dan Pakistan, yang terbiasa dengan Bahasa Inggris.³⁷

(Gambar 4.2 : Base MONUSCO pada 2015)³⁸

³⁶ *Ibid*, hal 29

³⁷ *Ibid*

³⁸ UN Economic Council for Africa, *op. cit.* hal 84



Permasalahan komunikasi yang buruk menjadikan MONUSCO sulit untuk melakukan reaksi tanggap dan cepat (*Rapid Response*). Akibatnya MONUSCO tidak dapat menanggulangi masalah sebelum terjadi. Komunikasi yang buruk dengan masyarakat juga membuat MONUSCO kesulitan mencari informasi yang berkaitan dengan gerakan bersenjata di Republik Demokrasi Kongo.³⁹

c. MONUSCO Kesulitan Melindungi Diri Sendiri

Pada November 2015, Sekjen PBB Ban Ki-Moon menyatakan akan segera menindak lanjuti dan mengutuk serangan dari kelompok pemberontakan yang

³⁹ UN Economic Council for Africa, *Conflicts in the Democratic Congo : Causes, Impact and Implications for Great Lakes Region*, 2015, hal 60

ditujukan kepada pasukan perdamaian PBB.⁴⁰ Sejak penerjunannya pada Juni 2010 MONUSCO telah mendapat serangan dari kelompok bersenjata, baik di markas, kamp operasi militer, maupun pada saat memberi bantuan kemanusiaan.

Hingga Desember 2015 tercatat MONUSCO telah mengalami serangan sebanyak 18 kali. Jumlah korban dari pasukan perdamaian selama misi di Republik Demokrasi Kongo sudah sebanyak 67 jiwa. Baik dari pasukan perdamaian atau personil humaniter.⁴¹

Rencana bantuan humaniter yang sudah dirancang hanya mendapat dana sebanyak 54 persen atau \$373 juta dari total \$692 juta. Ditambah lagi dengan meningkatnya serangan terhadap pekerja bagian humaniter, secara khusus penculikan, yang berujung pada gagalnya rencana tersebut.⁴²

Serangan yang paling sering dilakukan oleh kelompok bersenjata ADF. Mereka beroperasi dalam kelompok kecil, menyerang secara dadakan, menjarah, kemudian lari melalui hutan yang sulit dilewati oleh pasukan perdamaian PBB.⁴³

PBB tidak akan dapat melaksanakan stabilisasi keamanan yang ada di Republik Demokrasi Kongo apabila tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Untuk menciptakan keadaan aman yang stabil dan berkelanjutan (*positive peace*)

⁴⁰ Diakses pada <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52689#.WE0OpNV97IU> 4 Desember 2016

⁴¹ *Human Right Watch report of 2015* diakses pada <https://www.hrw.org/reports/1999/congo/Congoweb-02.htm> 3 Desember 2016

⁴² *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, 2015 hal 7

⁴³ UN News, *DR Congo: Ban condemns attack on UN base, calls for perpetrators to be brought to justice*, 2015, diakses pada <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52689#.WE0OpNV97IU> 3Desember 2016

diperlukan sistem yang berjalan dengan baik meski nantinya pasukan PBB sudah tidak lagi berada di Republik Demokrasi Kongo. Selain itu permasalahan lain seperti kesehatan, malnutrisi, HIV/AIDS, dan ekonomi juga harus diselesaikan. Bantuan yang diberikan PBB tidak dapat diterima oleh masyarakat apabila tenaga medis, bantuan pangan, dan obat-obatan kerap mengalami penyerangan oleh kelompok bersenjata.